Koran
Mimbar Umum
Tepercaya & Aktual
TERBIT SEJAK 6 NOVEMBER 1945
Edisi Digital tersedia di myedisi
78 Tahun Mimbar Melaju...
RABU, 29 MEI 2024/
21 ZULKAIDAH 1445 H
Harga Eceran
Rp. 4000,- (Dalam Kota)
Luar Kota + Ongkos Kirim
Berlangganan Hub. (061) - 7330737
Terbit 12 Halaman | Tahun LXXVIII No.127

'BADAI' KEMBALI MENERPA KEJAGUNG

Jampidsus Dilaporkan ke KPK

Jakarta, MIMBAR - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tengah polemik dibuntuti Detasemen Khusus (Densus) 88/ Antiteror.

Laporan dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) bersama sejumlah organisasi masyarakat lain, yang tergabung dalam Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST), Senin (27/5).

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Febrie diduga terlibat dalam pemufakatan jahat pelaksanaan lelang barang rampasan benda sita korupsi. Barang lelang itu berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (GBU), perusahaan tambang batubara di Kalimantan yang disita dalam kasus megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya.

"(Melaporkan) Febrie Adriansyah, Jampidsus Kejagung selaku pejabat yang memberikan persetujuan atas nilai limit lelang," ujar Sugeng saat ditemui di KPK, Jakarta, Senin (27/5).

■ *Bersambung ke Hal 11*

Papan Running Text Diretas

SEBUAH foto memperlihatkan sebuah bangunan dengan dua jendela besar di dalam kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Sebuah papan telop atau running text terpampang di atas dua jendela itu. Alih-alih bertuliskan informasi tentang pelayanan, papan itu justru bertuliskan "maaf aku hack".

■ *Bersambung ke Hal 11*

Lanjutan Sidang SYL

Hari Ini Ahmad Sahroni Diperiksa Pengadilan

Jakarta, MIMBAR - Penyanyi dangdut Nayunda Nabila Nizrinah hingga Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasdem, Ahmad Sahroni akan dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan menghadirkan Nayunda dan Ahmad Sahroni selaku anggota DPR sebagai saksi dalam sidang terdakwa SYL di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (29/5).

"Besok akan dihadirkan ataupun Jaksa telah memanggil beberapa orang saksi. Di antaranya adalah Nayunda dan beberapa pihak lainnya, termasuk juga saksi di luar berkas perkara yang akan dihadirkan yaitu anggota DPR RI atas nama Ahmad Sahroni," kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa sore (28/5).

Selain itu kata Ali, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK juga akan menghadirkan saksi-saksi lainnya, yakni Yuli Yudiyani Wahyuningsih selaku Analisis Kesehatan Klinik Utama, Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian (Kementan), Oky Anwar Djunaidi selaku supir pada Subbagian Rumah Tangga Pimpinan, Biro Umum dan Pengadaan Kementan, dan Nur Habibah Al Majid selaku ibu rumah tangga.

"Kami berharap saksi-saksi lainnya nanti bisa hadir besok sesuai dengan surat panggilan yang sudah dikirimkan oleh tim Jaksa KPK. Beberapa saksi besok juga terkait dengan aliran uang," pungkas Ali.

Dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap pejabat di Kementan dan penerimaan gratifikasi, SYL bersama 2 terdakwa lainnya, yakni Kasdi Subagyono selaku mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan dan Muhammad Hatta selaku mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan didakwa melakukan pengumpulan uang dari para eselon I yang berasal dari potongan 20 persen dari anggaran di masing-masing Sekretariat, Direktorat,

■ *Bersambung ke Hal 11*

SOAL PEMOTONGAN GAJI BUAT TAPERA

Serikat Pekerja Berontak

Jakarta, MIMBAR - Gaji para pekerja, baiki ASN, pegawai swasta, atau pekerja mandiri akan dipotong untuk simpanan tabungan perumahan rakyat (Tapera). Dengan demikian, apakah hal tersebut akan berpengaruh ke pengembang properti?

Dalam PP 21 tahun 2024 pasal 15 disebutkan bahwa besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.

■ *Bersambung ke Hal 11*

LP3HN Ungkap Dugaan Korupsi Timah Rp700 M

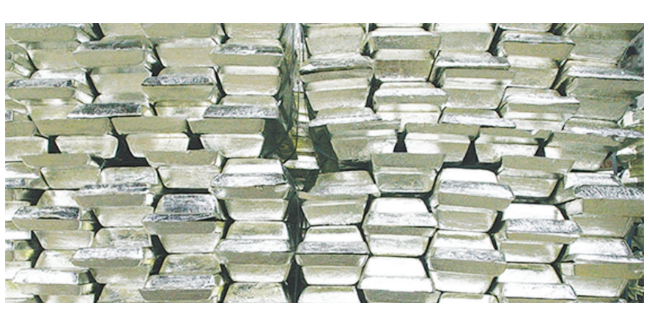

Jakarta, MIMBAR - Di saat Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang fokus menggarap kasus mega korupsi PT Timah Tbk yang diperkirakan berakibat kerugian keuangan negara sebesar Rp271 triliun, ternyata ada kasus Timah lain yang menggerogoti duit negara sekitar Rp700 miliar.

Lembaga Pemantau Pengelolaan dan Pendayagunaan Harta Negara (LP3HN) membeberkan kasus dugaan penambangan dan penjualan timah ilegal dengan nilai kerugian negara Rp700 miliar, terindikasi melibatkan Direktur Utama (Dirut) PT MIND ID, Direktur PT Timah ADV dan pengusaha yang juga penasehat (advisor) Dirut Timah, EK alias B.

Ketua Umum LP3HN, Saidin Sianipar mengatakan, dugaan penambangan dan penjualan timah ilegal ini melibatkan sebanyak 12 perusahaan yang mendapatkan surat perintah kerja (SPK) dari PT Timah selama tiga bulan Januari-Maret 2024.

Modus penambangan dan penjualan timah ilegal Selama periode Januari-Februari 2024, PT Timah melakukan pembelian biji timah dari beberapa perusahaan pemegang SPK sebanyak 618,01 ton dengan harga Rp220 juta per ton atau sekitar Rp135,9 miliar. Kemudian, pada Maret PT Timah kembali membeli sebanyak

■ *Bersambung ke Hal 11*

Trend Muallaf

Oleh : Dr. Muhammad Alfikri, S.Sos, M.Si.

UMAT Islam diprediksi mengalami pertumbuhan jumlah pemeluk lebih cepat dibandingkan kelompok agama besar lainnya. Data dari Pew Research Center menyebut, pemeluk agama Islam akan menyaingi atau bahkan melampaui pemeluk agama Kristen, agama dengan pemeluk terbanyak di dunia saat ini.

■ *Bersambung ke Hal 11*

Menuju Kebangkitan Islam Tabagsel (2)

Semangat Baru Masyarakat Muslim Tabagsel

Oleh : Dr. Suheri Harahap, M. Si
(Dosen Sosiologi Agama FIS UIN Sumut Medan)

BANGKITKAN semangat baru (Tu Sude Kahanggi, Mora, Anak Boru di Banua Na Napa-Napa ni Lubuk Raya). Mentalitas Kerja Keras & Belajar Keras. Semboyan Jepang maju lewat Restorasi Meiji, Malaysia Maju Lewat pendidikan Putra/i Melayu, munculnya kesadaran kelas bersaing dengan Etnis Cina & India.

Supremasi Melayu di Malaysia. Tabagsel harus digagas ideologi pembangunan lewat ideologi Islam dan ideologi Kebudayaan lokal Angkola. Mungkinkah ada restorasi agama & budaya Angkola atau sudah ditinggalkan, seakan kita bicara 'rasis'. Kapan kebangkitan masyarakat Muslim dan kearifan lokal. Dulu kaum buruh melawan kaum feodal. Antara sosialisme dan liberalisme/kapitalisme. Bagaimana 'membumikan Pancasila' di Bumi Dalihan Na Tolu.

Bagaimana menghadapi kekuatan kaum kapital pemilik tambang, perkebunan sawit.. dimana masa depan anak petani & bagaimana mencerdaskannya. Bagaimana mencegah korupsi di bidang pertanian? Mungkinkah ada kesadaran kaum petani marga harahap? Margalisasi kaum petani Tabagsell akan terpinggirkan jika tidak muncul perlawanan budaya lewat mentalitas baru dan menolak budaya miskin 'ugadis pe amang, inang kobun, saba i asal ma lalu sikolah mi, tradisi 'manggadisi,', 'sadia pe tabayar inang asal ma pegawai hamu, masuk polisi, tentara'. 'Marsaba do,

■ *Bersambung ke Hal 7*

LUAR NEGERI

Spanyol Resmi Akui Negara Palestina

Medan, MIMBAR - Pemerintah Spanyol pada Selasa (28/5) secara resmi mengakui negara Palestina, dalam sebuah keputusan yang disetujui oleh kabinetnya. Keputusan ini sejalan dengan langkah serupa yang dilakukan Irlandia dan Norwegia.

■ *Bersambung ke Hal 7*

bang Doke

■ Makin beringas bah ...

■ Hehehe..

Jampidsus Dilaporkan...

Dari Halaman 1

Sugeng mengungkapkan, saham tersebut hanya ditawarkan dengan harga Rp 1,945 triliun dan menimbulkan dugaan kerugian negara Rp 9,7 triliun. Lelang ini digelar pada 18 Juni 2023 dan dimenangkan oleh PT Indobara Utama Mandiri (IUM). Perusahaan yang disebut baru dibentuk 10 hari menjelang penjelasan lelang. "Waktu disita oleh Kejagung dinyatakan oleh Kejari Kubar (Kutai Barat) atau Kukar (Kutai Kartanegara) bahwa nilai yang disita itu sekitar Rp 10 triliun itu di tahun 2023," ujar Sugeng.

Sementara itu, praktisi hukum Deolipa Yumara yang datang bersama Sugeng menyebut pemenang lelang PT GBU baru enam bulan beroperasi. Deolipa menduga, dalam proses lelang itu terdapat indikasi penyalahgunaan lelang dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Laporan keuangannya juga belum ada, ini perusahaan baru berdiri tapi dia menang lelang," kata Deolipa.

Adapun pihak terlapor dalam perkara itu adalah, Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung, ST; Febrie; Pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Lalu, pihak swasta Andrew Hidayat, Budi Simin Santoso, dan Yoga Susilo yang diduga menjadi penerima manfaat (beneficial owner) PT IUM.

MODUS MARK DOWN

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Sugeng, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebut harga saham PT GBU yang ditawarkan dalam lelang tidak masuk akal. Boyamin menyebut, nilai total keekonomian atau nilai pasar wajar satu paket saham PT GBU minimal Rp 12 triliun.

Perusahaan tambang itu memiliki cadangan resource 372 juta metrik ton dengan total reserves (jumlah mineral yang bisa diekstraksi) 101,88 juta metrik ton, hauling road (jalan di pertambangan) 64 kilometer serta fasilitas Jetty.

Namun, saham PT GBU diduga di-mark down atau direndahkan dan hanya ditawarkan dengan harga Rp 1,945 triliun. "Ini tidak logis dan irasional," ujar Boyamin.

Boyamin lantas membandingkan lelang saham PT GBU dengan penjualan 100 persen saham PT Multi Tambangjaya Utama. Perusahaan itu terjual dengan harga Rp 3,4 triliun. Padahal. PT MTU hanya memiliki resevers 25 juta metrik ton dan kualitas infrastruktur yang tidak lebih baik. Menurut Boyamin, dugaan kecurangan lelang itu berisiko menimbulkan kerugian negara dan memperkaya Andrew, terduga penerima manfaat PT IUM selaku pemenang lelang. Padahal, Andrew diketahui sebagai terpidana korupsi kasus suap di Kalimantan.

Selain itu, kecurangan itu juga membuat pemulihan aset korupsi Jiwasraya tidak tercapai. "Dalam konteks pembayaran kewajiban uang pengganti terpidana Heru Hidayat sebesar Rp 10,728 triliun," kata Boyamin.

TANGGAPAN KPK

Sementara itu, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut pihaknya akan merespons laporan tersebut dengan cara yang sama. Nawawi mengatakan, KPK akan mengikuti prosedur baku yang berlaku di Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM). Aduan itu akan telaah terlebih dahulu sebelum akhirnya dilimpahkan ke penyelidikan atau diarsipkan. "Semua laporan atau pengaduan yang masuk tentu akan disikapi dengan prosedur baku penanganan yang sama," ujar Nawawi saat dihubungi, Senin.

Sementara itu, sampai saat ini pihak Kejagung belum memberikan respons atas dugaan keterlibatan Febrie dalam lelang tersebut. Adapun Febrie saat ini juga tengah menjadi sorotan karena diduga dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror saat makan malam di sebuah restoran di Jakarta.

Tidak hanya itu, puluhan anggota Brimob juga berkonvoi dengan kendaraan taktis di Kejaksaan Agung. Peristiwa ini membuat publik bertanya-tanya karena Jampidsus Kejaksaan Agung tengah menangani kasus dugaan korupsi tambang timah di Bangka Belitung. **(kps/js)**

Papan Running...

Dari Halaman 1

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, belum merespons. Adapun dua petugas keamanan yang ditemui Tempo di Kejaksaan Agung mengaku sudah tak melihat tulisan itu pagi ini.

"Yang jaga kemarin mungkin tahu," kata dia, dilansir dari Tempo, Selasa (28/5/2024). .

Mereka juga tak memperkenankan wartawan memeriksanya secara langsung. Akses wartawan hari ini, ujar salah satu petugas, hanya diberikan sepanjang liputan dilakukan dari luar pagar.

Dalam papan running text berlampu neon hijau itu, tulisan "maaf aku hack" tampak muncul berulang. Di jendela di bawahnya, terpampang informasi tentang penerimaan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi publik. Juga dimuat informasi tentang kanal-kanal yang dapat dihubungi untuk melapor.

Di samping kiri dan kanan jendela, tertempel banner bertuliskan sejumlah slogan. Banner sebelah kiri tampak tertulis "Puspenkum". Di depannya, hanya trotoar kecil dan jalan. Bangunan berlatar belakang gelap itu tampak dipotret pada malam hari.

Dugaan peretasan ini terjadi setelah sebelumnya Kejagung diduga diteror. Dugaan itu muncul berdasarkan sebuah video yang beredar di kalangan wartawan, pekan lalu.

Berdasarkan video singkat berdurasi 16 detik yang dilihat, terlihat konvoi belasan kendaraan roda dua dan roda empat, motor dan mobil, di sekitaran kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Belasan kendaraan tersebut sempat berhenti selama beberapa saat di depan gerbang utama kantor Kejagung sambil membunyikan sirine dengan keras.

Saat ini, Kejaksaan Agung memang menjadi sorotan usai mengungkap kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang bernilai Rp 271 triliun. Sehari sebelum konvoi kendaraan di depan kantor Kejagung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah diduga dikuntit oleh anggota polisi dari Satuan Detasemen Khusus Antiteror atau Densus 88. **(tem/js)**

Hari Ini...

Dari Halaman 1

dan Badan pada Kementan sejak 2020 hingga 2023, lalu pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di Kementan.

Pengumpulan uang itu disertai dengan ancaman, yakni apabila tidak memenuhi permintaan terdakwa tersebut, maka jabatannya dalam bahaya, dapat dipindahtugaskan atau dinonjobkan oleh terdakwa. Serta apabila ada pejabat yang tidak sejalan dengan hal yang disampaikan terdakwa tersebut agar mengundurkan diri dari jabatannya.

Jumlah uang yang diperoleh SYL selama menjabat sebagai Mentan dengan cara menggunakan paksaan sebesar total Rp44.546.079.044 (Rp44,5 miliar).**(rm/mc)**

Trend Muallaf

Dari Halaman 1

Negara penyumbang pertumbuhan populasi tersebut adalah penduduk di wilayah Afrika Sub-Sahara. Wilayah ini memiliki tingkat kelahiran yang tinggi sehingga menjadikannya sebagai kontributor utama pertumbuhan populasi pemeluk agama di dunia.

Pew Research Center pernah menerbitkan publikasi pada 2017 jumlah umat Islam diperkirakan akan meningkat sebesar 70 persen. Sementara populasi dunia diproyeksikan tumbuh sebesar 32 persen dalam beberapa dekade mendatang. Secara rinci, total seluruh muslim dunia diprediksi menjadi hampir 3 miliar pada 2060 mendatang. Adapun total sebelumnya, pemeluk agama Islam berjumlah 1,8 miliar pada 2015."Empat puluh lima tahun kemudian, jumlah pemeluk agama Islam diproyeksikan menjadi lebih dari tiga persepuluh penduduk dunia (31,1%).

Fenomena pindah Agama selalu menjadi realitas yang mengejutkan, terutama di Indonesia. Tidak selalu terjadi pada individu yang melakukannya, bisa jadi terjadi pada keluarga, pihak lain yang bersangkutan, atau bahkan orang-orang disekitar lingkungan, serta dari tahun ke tahun trend pertumbuhan Mualaf terus mengalami peningkatan. Pada 2016, data dari Mualaf Center Indonesia setidaknya ada 2854 orang masuk Islam yang tersebar di seluruh Indonesia.

Jumlah mualaf tertinggi terjadi pada tahun 2006. Meski tahun 2007 hingga 2009 sempat menurun. Namun pada tahun 2010, pertumbuhan jumlah mualaf kembali naik. Kemudian terus naik pada 2011, 2012, sampai sekarang naik terus angkanya. Paling tidak dalam lima tahun ke belakang sudah lebih dari 10 ribu orang masuk Islam.

Kalau dihitung dari 2011, sudah lebih dari 10 ribu orang," kata Ketua Mualaf Center Indonesia Steven Indra Wibowo belum lama ini. Steven juga mengungkapkan, penyumbang terbanyak jumlah mualaf justru dari daerah-daerah.

Trend komunikasi religius hari ini adalah semakin memuncaknya orang-orang berpindah agama ke Islam. Apa yang kita saksikan di media sosial dengan kehadiran Zakir Naik, ahli teologi agama yang mampu memukau pikiran banyak orang terhadap kebenaran ajaran Islam.

Zaik Naik, warga India, itu sepertinya berhasil memberi keyakinan baru bagi penganut agama lain dengan menyakini Islam adalah agama satu-satunya yang memiliki kebenaran absolut. Logika dan pemahaman Zakir Naik terhadap ajaran gama lan memang tidak terbantahkan.

Fakta lain yang cukup mencengangkan adalah para tokoh agama lain yang mengubah keyakinan agama ke muslim, baik membuat semakin memperkuat logika komunikasi religius bahwa agama yang dianutnya selama ini penuh dengan berbagai kepincangan dan kebohongan.

Komunikasi Religius adalah percakapan atau perdebatan antara komunikan dengan komunikator tentang teologi, sesuatu yang sangat penting dalam suatu agama. Dalam sejarah islam, riwayat orang - orang murtad pernah terjadi pada zaman khalifah Abu Bakar. Karena mereka beranggapan bahwa Islam adalah buatan nabi Muhammad, hingga setelah Nabi Muhammad SAW Wafat maka mereka kebanyakan menjadi orang - orang murtad. Berbeda dengan hari ini trend mereka menjadi mualaf karena kitab suci agama yang mereka anut selama ini selalu menunjukkan pertentangan hingga jauh dari keorisinilan. **(*)**

Serikat Pekerja...

Dari Halaman 1

Untuk peserta pekerja ditanggung bersama pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sementara itu, untuk peserta pekerja mandiri seluruh simpanan ditanggung olehnya.

Kabar tersebut langsung memantik banyak tanggapan dari berbagai pihak. Tak sedikit yang coba 'berontak' rencana pengenaan potongan gaji tersebut, salah satunya datang dari Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (DPP ASPEK Indonesia), Mirah Sumirat. Dilansir dari detikcom, Mirah mengungkapkan keresahannya lantaran saat ini para pekerja menurutnya sudah cukup tertekan dengan rendahnya upah yang kenaikannya masih jauh dari harapan, tak sebanding dengan kenaikan inflasi dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Belum lagi, para pekerja masih belum pulih dari pukulan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi virus Corona beberapa tahun lalu.

"Di tengah situasi keterpurukan kelesuan para pekerja buruh, karena sebelumnya ada kebijakan omnibus law yang mengakibatkan upahnya menjadi murah. Kemudian ada covid, terus di tahun 2021 ada PHK massal. Dan sekarang minim lapangan pekerjaan. Sungguh tidak pas rasanya pemerintah mengeluarkan aturan main PP terkait dengan (potongan) Tapera," kata dia saat dihubungi via sambungan telpon, Selasa (28/5).

Ia pun mengaku kecewa karena merasa tak dilibatkan oleh pemerintah dalam proses penyusunan kebijakan yang berkaitan erat dengan upah para pekerja ini.

"Persoalannya adalah, ketika sudah semakin terpuruk ekonomi ini karena upahnya murah, inflasi tinggi, kemudian harga pangan juga tinggi. Nah satu sisi pembuatan PP tersebut juga tidak pernah melibatkan partisipasi stakeholder yang terkait, dalam hal ini pekerja buruh," tegas Mirah.

Ia dengan tegas mengaku menolak rencana penerapan potongan gaji untuk tapera ini. Ia menegakan, pemerintah tak punya hati nurani bila kebijakan ini tetap dilanjutkan.

"Kalau saya menolak keras ada Tapera ini. Intinya adalah bahwa mereka pemerintah itu tidak punya hati nurani dalam mengeluarkan regulasi kepada pekerja buruh," imbuh dia.

MEMBERATKAN

Terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) lewat keterangan resminya menyatakan penolakan dengan tegas kebijakan pemerintah yang mewajibkan potongan gaji pekerja sebesar 3% untuk Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) itu.

Menurut APINDO, kebijakan tersebut bakal sangat memberatkan berbagai pihak baik pekerja itu sendiri maupun pelaku usaha.

"Sejak munculnya UU No. 4 Tahun 2016 tentang 'Tabungan Perumahan Rakyat' APINDO dengan tegas telah menolak diberlakukannya UU tersebut. APINDO telah melakukan sejumlah diskusi, koordinasi, dan mengirimkan surat kepada Presiden mengenai Tapera. Sejalan dengan APINDO, Serikat Buruh/Pekerja juga menolak pemberlakukan program Tapera. Program Tapera dinilai memberatkan beban iuran baik dari sisi pelaku usaha dan pekerja/buruh," kata Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, dalam keterangan resminya, Selasa (28/5).

Shinta mengatakan APINDO memiliki sejumlah pandangan terhadap regulasi tersebut. Pertama, APINDO pada dasarnya mendukung kesejahteraan pekerja dengan adanya ketersediaan perumahan bagi pekerja. Namun, PP No.21/2024 dinilai duplikasi dengan program sebelumnya, yaitu Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan pekerja bagi peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) BP Jamsostek.

"Tambahan beban bagi Pekerja (2,5%) dan Pemberi Kerja (0,5%) dari gaji yang tidak diperlukan karena bisa memanfaatkan sumber pendanaan dari dana BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Shinta.

Kedua, APINDO menilai pemerintah lebih baik mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan. Di mana sesuai PP maksimal 30% (Rp 138 triliun), aset JHT yang memilih total Rp 460 triliun dapat digunakan untuk program MLT perumahan pekerja. Dana MLT yang tersedia pun sangat besar, namun sangat sedikit pemanfaatan.**(det/js)**

LP3HN Ungkap...

Dari Halaman 1

652,73 ton dengan harga Rp220 juta per ton atau Rp143,6 miliar.

"Total pengeluaran PT Timah selama Januari-Maret 2024 untuk membeli biji timah tersebut senilai Rp279,56 miliar," kata Saidin, melalui keterangan tertulis, Selasa (28/5).

Saidin menjelaskan, asal usul sumber biji timah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pembelian biji timah tersebut dilakukan atas perintah Dirut PT Timah, setelah mendapat perintah lisan dari Kepala Satgas MIND ID berinisial D yang mendapat mandat langsung dari Dirut MIND ID.

"Dalam SPK yang diperoleh EK dan kawan-kawan, bahwa biji timah yang diperoleh dari wilayah kerja pemegang SPK harus diserahkan ke PT Timah. Para pemegang SPK mendapat upah kerja secara persentase dengan besaran yang sudah disepakati dan tidak bersifat jual beli," terang Saidin.

Menurutnya, pembelian biji timah tersebut dilakukan karena para penambang mengatakan bahwa biji timah itu diambil di luar wilayah kerja sebagaimana disepakati dalam SPK.

"Setelah transaksi selesai, para penjual barang tidak bisa menjelaskan asal usul sumber biji timah yang dibeli tersebut. Diduga biji timah tersebut hasil dari area penambangan dalam IUP PT Timah," ungkapnya.

Ia menuturkan, hasil pemurnian biji timah batangan tersebut tidak dapat dijual di pasar resmi, karena ketidakjelasan asal asul biji timah. Para pelaku kemudian membuat dokumen palsu asal usul barang dengan beberapa alasan.

Pertama, kemungkinan biji timah itu diperoleh dari area SPK maka polanya tidak jual beli dan PT Timah hanya memberikan upah kerja, bukan melakukan jual beli.

Apabila dilakukan jual beli dengan Timah, maka harga pembelian dari lokasi penambangan milik PT Timah sebesar Rp100 juta per ton.

"Diduga telah terjadi penggelembungan harga (mark up) yang dilakukan PT Timah dari harga pembelian yang seharusnya Rp100 juta per ton menjadi Rp 200 juta per ton," ucapnya.

Saidin menduga, selisih dari harga yang pembelian tersebut diduga masuk ke kantong pribadi Dirut PT MIND ID dan kelompok EK.

"Dalam kasus ini PT Timah berperan sebagai fasilitator penambangan illegal, penadah biji timah illegal dan pengrusakan ekologis yang berujung kerugian negara," ungkapnya.

Ia menambahkan, bahwa regulasi yang berlaku di perdagangan timah mewajibkan kejelasan asal usul barang sejak dari lokasi tambang sampai di proses pemurnian menjadi timah batangan. Apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan maka timah batangan tersebut tidak dapat di perdagangkan di pasar resmi.

"Harga timah batangan sekitar US$ 34.000 per ton atau sekitar Rp550 juta per ton. Total biji timah yang ditambang perusahaan-perusahaan tersebut selama Januari-Maret 2024 sebanyak 1.270,74 ton atau sekitar Rp700 miliar. Sampai saat ini PT Timah tidak bisa menjual timah batangan tersebut karena ketidakjelasan asal usulnya," bebernya.

Ia mengungkapkan, diduga kuat para pelaku melakukan penjualan timah batangan tersebut secara ilegal dengan cara diseludupkan ke luar negeri dengan berbagai cara dengan mengubah bentuk batangan menjadi hasil seni ukir dan lainnya yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp700 miliar.

Atas adanya dugaan temuan ini, Saidin mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus ini bekerjasama dengan BPK dan atau BPKP untuk mengaudit pembelian biji timah dan penjualan hasil pemurnian bulan Januari-Maret 2024. Pasalnya, diduga kuat adanya pemalsuan dokumen.

"Saya minta semua dokumen sumber barang dan SPK yang dikeluarkan oleh PT Timah diperiksa. Demikian haknya dengan semua pemilik perusahaan penerima SPK yang merupakan perpanjangan tangan HPS yang diduga merugikan negara," pungkas Saidin.**(rm/js)**

Spanyol Resmi...

Dari Halaman 1

Dilansir kantor berita AFP, Selasa (28/5), juru bicara pemerintah Spanyol, Pilar Alegria mengatakan kabinet telah "mengambil keputusan penting untuk mengakui negara Palestina, yang memiliki satu tujuan: membantu Israel dan Palestina mencapai perdamaian".

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez mengatakan pada Selasa pagi waktu setempat, bahwa pemerintahnya akan menyetujui langkah untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

"Ini adalah keputusan bersejarah yang memiliki satu tujuan - untuk berkontribusi dalam mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina," katanya dalam pidatonya di Madrid.

Sanchez menekankan bahwa Spanyol akan mengakui negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967, hanya mengakui perubahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

"Meskipun Spanyol tidak berhak menentukan perbatasan negara lain, posisi kami sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, ... dan dengan posisi yang secara tradisional dipegang oleh Uni Eropa," katanya.

Sanchez mengatakan Spanyol juga akan mengakui negara Palestina bersatu yang diperintah oleh Otoritas Palestina, yang oleh Sanchez disebut sebagai "mitra kami untuk perdamaian."

Tindakan mengakui Palestina bukan berarti menentang Israel, namun "menunjukkan penolakan langsung kami terhadap Hamas - yang menentang solusi dua negara," tegasnya.

Pada hari Selasa ini, Norwegia dan Irlandia juga akan secara resmi mengakui negara Palestina. "Keputusan hari ini didasarkan pada hukum internasional dan penghormatan terhadap tatanan berbasis aturan - prinsip-prinsip yang memandu kita, apa pun konteksnya," kata Sanchez.

Pemimpin Spanyol itu menambahkan bahwa mulai besok, fokusnya adalah mendorong solusi dua negara untuk membawa perdamaian abadi di wilayah tersebut.

Untuk mencapai solusi dua negara yang bertahan lama, Sanchez mengatakan prioritas utama adalah "mengakhiri krisis di Gaza," yang mencakup mencapai gencatan senjata permanen, akses tanpa hambatan terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan pembebasan semua sandera Israel. Terakhir, ia mengatakan Spanyol akan "terus memupuk kerja sama dengan mitra-mitra yang berkomitmen terhadap perdamaian dan kemakmuran di kawasan" untuk menyelenggarakan konferensi perdamaian internasional yang akan menerapkan solusi dua negara.

"Dengan keputusan hari ini, kami memikul tanggung jawab kami dalam mengupayakan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan semua orang," tandasnya. **(det/js)**

Semangat Baru...

Dari Halaman 1

mangguris, maragat' kobun pe saotik do, 'harani parange ni aya mu targadis kobun i', 'saba pe manyewa, biama hamu sikolah inang, nakkon be marcita-cita hamu, sugari cepat ma marbagas. Cerita dan lagu 'Marudan Marlasniari' bukti kuatnya etos kerja Muslim di Tabagsel tapi karena mentalitas kerja akabat pola industrialisasi/modernisasi membuat sistem kehidupan masyarakat tidak berdaya.

Adakah terjadi eksploitasi sumber daya alam kita. Identitas lokal bisa jadi pendorong pembangunan, bisa juga pemicu konflik akibat kecemburuan sosial. visi misi kepala daerah tentang percepatan pembangunan di Tabagsel dan inimnya perhatian Pemerintah Kabupaten se Tabagsel tentang tata kelola potensi alam yang sangat kaya hasil bumi, tentu pengelolaan alam harus berbasis kearifan lokal (Dalihan Na Tolu). Dampak industrialisasi di bidang pertanian telah menambah kerusakan lingkungan. Wilayah Tabagsel yang cukup luas tetapi masuknya investor dan eksploitasi sumber daya alam oleh perusaahaan baik lokal dan program pemerintah pusat seperti Kawasan Energi Terbarukan (EBT) seperti PLTA di Sipirok, PLTU di Madina serta hasil bumi baik tambang resmi dan illegal.

Potensi lain yang belum tersentuh anggaran khususnya areal lingkar Danau Siais belum lagi mungkin dampak limbah akan mengancam perikanan dan pertanian. Pertanian menjadi agenda proyeksi kebangkitan Islam Tabagsel kedepan rakyat Tabagsel lewat RPJM yang disusun dan direncanakan mestinya melibatkan pakar tata ruang yang memiliki basis pengetahuan akan daerah seperti adat budaya Angkola-Mandailing. Para Kepala Bappeda seTabagsel dan tim kajian yang dibuat harus terbuka dan mempertahan heritage dan meningkat ekonomi masyarakat mayoritas Muslim. Para legislator punya peran dalam mengawasi hak-hak masyarakat lokal. Kepentingan politik lokal begitu berpengaruh, para agen (aktor) terus bermain di arena politik dan ekonomi. Kapan umat Islam Tabagsel sejahtera cerdas dan bahagia?

Bupati/Walikota se Tabagsel perlu menata ulang konsep perhutanan/pertanahan/kawasan strategis agar masyarakat yang datang tidak semena-mena berkebun, Kepala Desa tidak menjual tanah tanpa sepengetahuan masyarakat adat. Kami akan pantau dan rekomendasikan kepada Bapak Kapolda Sumut turun dan evaluasi konflik pertanahan. Mari kita kawal terus lahan usaha tani dari dampak perusahaan atas kehidupan dari air, tanah, sungai sejak leluhur membuat kampung (desa). Memajukan pertanian/budidaya ikan tawar, tambak, perkemahan, kuliner, syuting film dan potensi lainnya di Danau Siais. Konflik vertikal kita jauhi antara masyarakat dengan pemerintah. Kita bangun kesadaran kelompok sosial di bumi dalihan na tolu memberi solusi integratif/kolaboratif dan kritik terhadap teori pembangunan modernisasi yang tidak sesuai dengan akar historis Tapsel. MEMUTUS MATA RANTAI RENTENIR TERHADAP PETANI DI TAPANULI SELATAN. (Mewujudkan Zikir Produktif dan Peran Baznas). Berkembangnya jenis koperasi di masyarakat sangat mengganggu dan perlu solusi ekonomi umat di pedesaan.**(*)**